

## Eksil Banten dan Terbentuknya Komunitas Muslim di Minahasa Abad XIX

Roger Allan Christian Kembuan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: rogerkembuan@unsrat.ac.id\*

\*Korespondensi



Received: 08-02-2024, Revised: 25-05-2024, Accepted: 25-05-2024, Published: 29-05-2024

### Abstrak

Artikel ini membahas kehidupan sosial budaya dan perkembangan komunitas eksil Muslim dari Banten di pengasingan Minahasa sebagai lokasi pengasingan seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menempatkan para eksil yang berasal dari Banten di Karesidenan Manado (Minahasa) pada sepanjang abad ke-19. Metode sejarah dipergunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan sumber Arsip Kolonial kurun waktu abad ke-19 yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, laporan perjalanan, dan sumber lokal terutama manuskrip yang tersimpan oleh keturunannya di Tomohon dan Minahasa. Temuan dalam penelitian ini adalah; Pertama, siapa saja Tokoh-tokoh dari Banten yang diasingkan di Minahasa. Kedua, alasan Minahasa dipilih sebagai lokasi pengasingan Pemerintah Kolonial Belanda. Ketiga, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh para eksil di Kampung Jawa Sarongsong Minahasa. Keempat, bagaimana relasi Islam dan Kristen seiring kedatangan para eksil dari Banten di Manado dan Minahasa.

**Kata Kunci:** akulturasi; eksil; Islam; kampung Jawa Sarongsong; Minahasa

### Abstract

This article discusses the socio-cultural life and development of the exiled Muslim community from Banten in the Minahasa Residency, which was a location for exile in line with the Dutch colonial government's policy of placing exiles from Banten in the Manado (Minahasa) Residency throughout the 19th century. The historical method used in this research is by using the 19th century Colonial Archives stored in the National Archives of the Republic of Indonesia, travel reports, and local sources, especially manuscripts kept by their descendants in Tomohon and Minahasa. The findings in this research are: First, who are the figures from Banten who were exiled in Minahasa. Second, the reason Minahasa was chosen as the location of exile for the Dutch Colonial Government. Third, the form of adaptation carried out by the exiled community in Sarongsong village, Minahasa, Java. Fourth, what is the relationship between Islam and Christianity after the arrival of exiles from Banten in Manado and Minahasa.

**Keywords:** acculturation; Islam; isolate; Minahasa; village Javanese of Sarongsong



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

### Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai para tokoh eksil yang ditempatkan pemerintah kolonial Belanda di Karesidenan Manado pada sepanjang abad XIX

yaitu di sebuah distrik di pedalaman Minahasa yaitu di kampung yang terletak di distrik Sarongsong. Sebuah desa kecil yang dibangun oleh orang-orang yang diasingkan pemerintah kolonial Belanda dari wilayah Banten karena melakukan pemberontakan.

Para tahun 1839 di Banten ada suatu persekutuan yang sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin seorang tokoh yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1836 bernama Ratu Bagus Ali yang pada pemberontakan Nyai Gumparo terkenal dengan nama Kiai Gede. Pelaku pemberontakan yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini ialah seorang bergelar Pangeran Kadli dan Mas Djebeng. Mereka terlibat dalam sebuah pemberontakan yang dikenal dengan nama Goedang Batu. Pemberontakan tersebut gagal dan pemerintah kolonial Belanda kemudian dengan kekuatan bersenjata menangkap para pelaku yang terlibat. Akibat pemberontakan ini, mereka diasingkan ke Manado dan Banyuwangi (ANRI, 1973).

Tubagus Buang diasingkan ke Kampung Jawa Tomohon bersama-sama Abusalam, Mas Djebeng, Mukali, Ibrahim, Abdul Wahid, Abdul Haji dan Abdul Rais. Mereka tiba sekitar tahun 1840 di Karesidenan Manado dan kemudian ditempatkan di wilayah pedalaman Minahasa. Tubagus Buang dengan pengikut-pengikutnya tidak diizinkan membawa istri dari Banten. Mereka kemudian menikahi gadis-gadis Minahasa, terutama dari wilayah Sarongsong, Sonder, Pineleng dan Tondano.

Dalam peristiwa yang berbeda, ada juga tiga eksil dari Banten lainnya yang diasingkan di tempat ini pada tahun 1850. Mereka bernama Raden Bagus (Tubagus) Jayakarta, Tubagus Suramarja dan Tubagus Mustafa. Pengasingan ketiganya di Tomohon berawal dari peristiwa "Pemberontakan Wakhia" pada 1850. Pemberontakan ini diawali oleh persekutuan ulama dan bangsawan yang tidak puas dan merasa tersingkir akibat keputusan pemerintah kolonial dalam penunjukkan Bupati baru. Pemerintah Belanda kemudian merespon kejadian tersebut dengan mengirimkan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan ini. Satu persatu pemimpin pemberontakan kemudian tertangkap. Tubagus Djayakarta ditangkap bersama Tubagus Suramardja pada 15 April 1850 (Kartodirdjo, 1966, p. 126). Melalui Besluit Gubernur Jendral tanggal 30 Oktober 1850 No. 2, Tubagus Djayakarta, Suramardja dan Tubagus Mustafa dibuang ke Manado (Kartodirdjo, 1966, p. 127).

Mengenai peristiwa pemberontakan Banten 1888 telah ditulis dengan sangat rinci oleh Sartono Kartodirdjo. Pemberontakan ini diawali oleh propaganda yang terjadi sejak dua dasawarsa sebelumnya. Di Banten sejak periode tahun 1870 terjadi kebangkitan gerakan keagamaan melalui Tarekat Qadiriyyah. Selain bangkitnya gerakan keagamaan di Banten, alasan lain yang kemudian berpengaruh terhadap terjadinya pemberontakan ialah adanya keterkaitan langsung antara meletusnya Krakatau dan terbentuknya Cilegon sebagai pusat pemerintahan lokal di Banten. Ketika terjadi tsunami, Anyer sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan kolonial setempat hancur total, sehingga pusat afdeling Anyer dipindahkan ke Cilegon. Anyer sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan kolonial setempat hancur total, sehingga pusat Afdeeling Anyer dipindahkan ke Cilegon (Alfian, et al., 1987, p. 222). Pemandangan ini membuat orang Eropa kemudian tinggal di wilayah Cilegon. Tindakan ini bersamaan dengan propaganda kebencian terhadap barat yang sedang memuncak di kalangan penganut tarekat

Qadiriyyah. Sekalipun hanya 8 orang Eropa dan 9 orang pribumi terbunuh, namun peristiwa ini sangat menghebohkan dunia kolonial Hindia Belanda, dan peristiwa ini diselidiki secara besar-besaran oleh pihak Belanda.

Haji Wasid dan beberapa pemimpin pemberontakan kemudian dihukum gantung. Sedangkan yang lainnya menerima hukuman dibuang berjumlah 94 orang (Kartodirdjo, 1966; Jongmans, 1921, p. 204, Kolonial Verslag, 1889, pp. 3, 4, 74). Dari jumlah tersebut ada 17 orang yang dibuang di beberapa tempat di Karesidenan Manado, termasuk di antaranya 5 orang yang dibuang ke Minahasa. Mereka diasingkan pada tahun 1889. Dan menjalani beberapa tahun kerja paksa dan di penjara di Manado. Pada tahun 1903 van Kol, ketika berkunjung ke Manado, menulis pertemuannya dengan beberapa narapidana dari Banten di Penjara Manado (van Kol, 1903, p. 301). "they had been accomplices in the "horrible murders" in Cilegon, and were serving sentences of fifteen years hard labor".

Lima belas tahun kemudian yaitu pada tahun 1903 masa tahanan mereka telah selesai (*dwangarbeid*). Setelah mereka menyelesaikan hukuman di penjara Manado, mereka kemudian dibebaskan. Namun belum diizinkan pulang ke Banten. Dan pada tahun 1918 mereka diberikan pengampunan untuk kembali ke Banten (Bataviaasch nieuwsblad, 1918; De Sumatra Post, 1918). Beberapa dari mereka pulang ke Banten, Namun ada beberapa dari mereka yang memilih untuk menetap di Minahasa. Termasuk ada lima orang yang menetap di Tondano setelah masa tahanan mereka berakhir. Carpentier Alting yang mengunjungi Kampung Jawa Sarongsong pada 1902 menyebutkan bahwa ada 161 jiwa penduduk Islam yang mendiami sebuah "koloni kecil" kampung Jawa Sarongsong (Carpentier Alting, 1902).

## Metode

Penelitian ini adalah upaya untuk menjelajahi bagian sejarah Minahasa dengan menggunakan metode penelitian sejarah dalam empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pendekatan yang dilakukan adalah sejarah sosial yang berkaitan dengan kebijakan pengasingan pemerintah kolonial Belanda pada abad XIX.

Dalam proses Heuristik, penulis mengandalkan tiga jenis sumber utama yaitu: arsip kolonial, sumber manuskrip, dan *slaagboom* dari keluarga keturunan para eksil Banten di Minahasa, serta tambahan sumber dalam bentuk buku. Arsip kolonial menjadi pintu masuk untuk memahami lapisan sejarah para eksil Banten yang diasingkan ke Minahasa abad XIX. Penelusuran Arsip Nasional untuk mengakses dokumen-dokumen terkait. Dalam arsip kolonial ini, kami menemukan catatan administratif, laporan resmi, *besluit*, dan berbagai dokumen lainnya yang mencerminkan aspek-aspek kehidupan di para eksil Banten di Minahasa selama abad XIX. Dari sumber ini, kami dapat melacak perkembangan kebijakan kolonial, peristiwa penting, dan dampaknya. Selain dokumen resmi, sejarah oral dan peninggalan tulisan tangan menjadi bagian penting dari penelitian ini. Mengumpulkan sumber-sumber manuskrip yang dimiliki oleh keluarga para keturunan eksil Banten termasuk surat, catatan harian, foto-foto lama. Sumber-sumber ini memberikan perspektif subjektif tentang kehidupan sehari-hari, perjuangan, serta perubahan budaya yang dialami. selain ini juga *Slaagboom*

keluarga keturunan dari Eksil Banten di Minahasa memiliki kisah yang menarik tentang relasi pernikahan dengan masyarakat Minahasa.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara terkait oral history dari keluarga-keluarga keturunan eksil Banten yang ada di Minahasa. Slaagboom, atau pohon keluarga, dari keturunan eksil ini menjadi petunjuk penting dalam penelitian kami. Dengan menganalisis jejak keluarga eksil ini, kami berharap dapat memahami bagaimana eksil politik dan budaya telah membentuk identitas dan sejarah komunitas eksil di Minahasa. Kami juga melakukan wawancara mendalam dengan anggota keluarga yang tinggal di Tomohon, Manado dan Minahasa. Selain itu, juga memanfaatkan sumber-sumber dokumen dalam bentuk buku. Juga merujuk pada berbagai buku sejarah, monograf, ensiklopedia regional, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan Minahasa. Sumber-sumber ini membantu pemahaman tentang konteks sejarah Minahasa, mengidentifikasi sumber-sumber primer yang mungkin terlewatkan, dan membandingkan temuan kami dengan hasil penelitian sebelumnya.

Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk mengungkap jejak sejarah sebuah komunitas eksil kecil Minahasa yaitu Kampung Jawa Tomohon, dari masa kolonial hingga perkembangan sosial dan budaya sepanjang abad XIX. Dengan melakukan analisis dan interpretasi yang cermat terhadap sumber-sumber ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah dan identitas unik Minahasa, khususnya terkait dengan pengaruh eksil Banten dalam dinamikanya pada sepanjang abad ke XIX di Minahasa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Minahasa sebagai Lokasi Pengasingan**

Di akhir abad XVIII dan awal abad XIX Belanda kehilangan dua koloni pentingnya yaitu Tanjung Harapan di Afrika selatan dan Srilanka (Ceylon) yang diambil alih oleh Inggris tahap demi tahap antara 1795-1806 semasa rangkaian perang revolusioner dan perang Napoleon (Schrikker, 2007). Lepasnya dua koloni ini telah membuat gubernemen Belanda di Hindia Timur kehilangan tempat pengasingan bagi para pembesar Jawa dan Nusantara di luar negeri. Terlebih ketika di awal abad XIX ketika Inggris menguasai Hindia Timur pada periode 1811-1816, mereka kemudian menggunakan koloninya di Penang sebagai lokasi pengasingan. Sebagai contoh pengasingan oleh Inggris yang berasal dari Hindia Timur yaitu Sultan Hamengku Buwono II (Ricklefs, 2001, p. 147).

Setelah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda pada 1816, bukan lagi kongsi dagang mereka VOC yang memegang kendali, namun telah digantikan dengan pemerintah Hindia Belanda. Usaha untuk mencari lokasi pengganti dilakukan pada tahun 1824, ketika Gubernur Jendral Hindia Belanda van der Capellen melakukan kunjungan ke wilayah timur Hindia yaitu di Gubernemen Maluku yang mencakup Ambon, Ternate dan bagian utara pulau Sulawesi (Olivier, 1837). Dalam kunjungannya ia menyempatkan singgah ke Minahasa dengan agenda utama meresmikan karesidenan baru yaitu Manado yang terpisah dari karesidenan Ternate. Dalam kunjungan itu ikut juga Gubernur Ambon saat itu yaitu Pieter Merkus (van der Aa, 1869, pp. 889-900).

Mereka mengunjungi pedalaman Minahasa dan sempat ke Tondano. Berada di Tondano, van der Capellen dan Merkus menyadari bahwa dataran Tondano ini adalah lokasi ideal untuk dikembangkannya pertanian sawah dan juga lokasi ini yang sangat terisolir dapat digunakan sebagai lokasi pengasingan nantinya. (Dumont d'Urville, J. S. C. 1834.). Di penghujung akhir perang Jawa yang berakhir dengan tertangkapnya Kiai Modjo dan pengikutnya pada 1828 dan kemudian Pangeran Diponegoro pada 1830. Pemerintah Belanda kesulitan untuk menentukan lokasi pengasingan untuk mereka. Sebuah usul untuk memenjarakan Diponegoro di salah satu kastil kerajaan di Belanda serta merta ditolak oleh raja Belanda dan disarankan untuk mencari lokasi yang cocok di Hindia Timur (Carey, 2012, pp. 837, 840; ANRI, 1830). Dalam mengurus hal tersebut, Van den Bosch menugaskan Pieter Merkus anggota Dewan Hindia yang baru saja diangkat sebagai komite restrukturisasi dan administrasi kolonial (Regeringscommissaris voor de Vorstenlanden) sesudah perang Jawa. Selain hal yang bersifat administratif, Pieter Merkus juga ditugaskan untuk mengurus hal yang penting lainnya yaitu bagaimana nasib dari orang-orang yang ditangkap sebagai *staatgevangen* (tahanan Negara) di Batavia yang jumlahnya sekitar 100 orang termasuk Diponegoro dan Kiai Modjo. Untuk mendapatkan lokasi yang cocok Pieter Merkus kemudian menghubungi bekas bawahannya di Ambon yaitu D. W. F. Pietermaat (van der Aa, 1869, pp. 296-297).

Pietermaat sangat merasa berhutang budi kepada Merkus sebab ia adalah orang yang berpengaruh melobi Gubernur Jendral sebelumnya yaitu du Bus Gisignes untuk kenaikan jabatan Pietermaat dari pegawai biasa urusan *magistraat en fiscal bewezen* di pulau Banda menjadi Residen Manado pada awal tahun 1827 (van Cleef, 1828, p. 276). Sehingga ketika Pieter Merkus membutuhkan bantuan untuk pemilihan lokasi pengasingan yang baru, Residen Manado Pietermaat dengan cepat memberikan kesanggupan untuk menyediakan sebuah lokasi yang cocok sebagai tempat pengasingan. Rancangan kebijakan, rincian kebijakan dan langkah-langkah penanganan pasca perang Jawa dilaksanakan olehnya dan dua rekannya di *De heer Raaden van Indie* (Anggota Dewan Hindia) J. C. Goldman dan M. C. Bousquet. Sebuah catatan penting untuk Pieter Merkus terkait kebijakan pengasingan di Minahasa di periode selanjutnya juga yang memberi perintah untuk pengasingan Tuanku Imam Bonjol ke Ambon pada 1838 dan yang menandatangani surat pemindahan Tuanku Imam Bonjol ke Manado pada 1841 serta yang menandatangani besluit pengasingan Kiai Hasan Maulani dari Cirebon pada tahun 1842.

Minahasa merupakan sebuah tempat yang sangat khusus bagi Belanda pada abad ke XIX. Merupakan salah satu tempat pembuangan bagi orang-orang yang menentang pemerintah Kolonial. Terletak di jazirah utara pulau Sulawesi yang jauh dari Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Alasan pemilihan Tondano sebagai salah satu lokasi pembuangan oleh Pieter Merkus dan Residen Pietermaat dikarenakan lokasi ini sangat terisolir juga pada waktu itu ditinggali oleh orang-orang yang masih alifuru (sebutan untuk penduduk dibagian timur Hindia yang masih memeluk agama lama), dan baru saja beberapa waktu yang lalu sebelumnya terjadi perang Tondano. Daerah ini pada awal abad XIX sangat terisolasi dari dunia luar dan terletak di pedalaman sehingga jarak ke pantai yang jauh, sekitar 15 paal (22,6 km) dari pantai dan yang terpenting di Tondano, Belanda memiliki garnisun

militer yang cukup besar untuk mengawasi penduduk yang pernah memberontak tersebut. Wilayah lainnya yang juga digunakan ialah Tomohon dimana sebuah lokasi pengasingan didirikan di Distrik Sarongsong, sebuah lokasi di desa Lotta di Distrik Kakaskasen dan di wilayah Pondol yang terletak di dalam kota Manado. Posisi geografis Minahasa pada masa tersebut yang terisolir adalah sebuah keniscayaan untuk bisa kembali ke Jawa dan tempat lainnya di Hindia Belanda karena, kapal- kapal yang berlabuh di pelabuhan di wilayah ini hanya kapal-kapal Belanda (seluruh pelabuhan di semenanjung utara pulau Sulawesi statusnya ialah pelabuhan tertutup) dan lokasi ini diisolir oleh pemerintah kolonial dari pengaruh luar terutama Inggris.

### **Ratoe Bagus Ali alias Tubagus Buang**

Di Banten, sepanjang abad ke XIX banyak terjadi pemberontakan. Diawali pada tahun 1811 terjadi pemberontakan di Pandeglang dengan pemimpinnya bernama Mas Djakaria. Pada bulan Februari tahun 1823 terjadi pemberontakan di Kedu Dago Lebak Wangi oleh mandor distrik bernama S. Ali alias Tubagus Buang. Kemudian pada tahun 1827 terjadi lagi pemberontakan oleh Mas Djakaria. Kali ini ia tertangkap dan dihukum mati. Selanjutnya pada tahun 1836 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Nyai Gumparo (Nyai Gamparan). Meski pun pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun pengikut-pengikutnya yang dapat meloloskan diri, tetap berusaha kembali meneruskan perlawanan (ANRI, 1973, p. 3). Sebagian pemberontak tahun 1836 masih dapat berkeliaran di daerah Banten sehingga menimbulkan pemberontakan yang baru.

Tabel 1. Daftar nama staatgevangenen di karesidenan Manado yang berada di Distrik Sarongsong, Tomohon tahun 1852

No	Nama	Keterangan
1	S. Ali alias Kiai Gede/Ratoe Bagoes Alie	Tubagus Buang
2	Maas Djebeng	Djebeng
3	Haji Seh Idris alias ... Mukalie	Mukali
4	Brahim	Ibrahim
5	Boesalam	Abusalam
6	Doelkaji	Abdul Haji
7	Tubagus Djojokerto	T. Djayakarta
8	Tubagus Suramardja	T. Suramarja
9	Tubagus Musthapa	T. Musthapa

Sumber: Lijst der Staat Gevangenen de Residentie Menado 1852, ANRI Menado No. 25.

Para tahun 1839 di Banten ada suatu persekutuan yang sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin seorang tokoh yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1836 bernama Ratu Bagus Ali yang pada pemberontakan Nyai Gumparo terkenal dengan nama Kiai Gede. Pelaku

pemberontakan yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini ialah seorang bergelar Pangeran Kadli dan Mas Djebeng (Peran Mas Djebeng atau Mas Jabeng ada disebut dalam pemberontakan di Banten tahun 1839 yang dipimpin oleh Ratu Bagus Ali, Pangeran Kadli dan dirinya. Mas Jabeng disebut sebagai putra Mas Djakaria, pemimpin pemberontakan di Pandeglang tahun 1811 dan 1827. Mereka terlibat dalam sebuah pemberontakan yang dikenal dengan nama Goedang Batu. Goedang batu adalah nama sebuah desa yang terletak di Serang Banten. Oral history Kampung Jawa Sarongsong oleh Abdul Razak Tumenggung juga merujuk cerita bahwa Tubagus Buang memimpin pemberontakan yang dikenal dengan Goedang Batu. Pemberontakan tersebut gagal atas prakarsa dari bupati Serang yang kemudian menghubungi Belanda dan kemudian dengan kekuatan bersenjata menangkap para pelaku yang terlibat. Akibat pemberontakan ini, mereka diasingkan ke Manado dan Banyuwangi melalui Besluit 14 April 1840 No. 5 (ANRI, 1973, p. 3).

Tubagus Buang dibuang ke Kampung Jawa Tomohon bersama-sama Abusalam, Mas Djebeng, Mukali, Ibrahim, Abdul Wahid, Abdul Haji dan Abdul Rais. Mereka tiba sekitar tahun 1840 di Karesidenan Manado dan kemudian ditempatkan di wilayah pedalaman Minahasa (Kojongian, 2011). Awalnya para orang buangan tersebut ditempatkan di Lota Pineleng (Palar, 2009). Kemudian mereka dipindahkan lagi di Lembuyan di distrik Kakaskasen Tomohon,. Lalu dari Kakaskasen, mereka pindah di Papakanan. Dari Papakanan oleh Tubagus Buang mereka kemudian pindah bermukim di Lepo, kini wilayah kebun sawah antara desa Walian-Lansot, dekat tempat bernama Mandei. Setelah sempat tinggal beberapa saat di tempat itu, kemudian pindah ke sebuah tempat bernama Lepo, tidak lama pula mereka pindah dan membangun kampung di sebelah selatan disebuah daerah hutan lebat yang di masa itu terkenal sangat angker. Lokasi itu dikenal dengan nama Kayu Payung (Disebut 'kayu payung', sebab sekitar pemukimannya seakan dipayungi oleh pohon besar tersebut. Dalam bahasa Tombulu disebut dengan kawangko yang artinya kayu besar) lokasi ini sekitar dua kilometer selatan Kampung Jawa Sarongsong yang sekarang.

Ketika berada di pemukiman mereka di Kayu Payung, kemudian Tubagus Buang dan Mas Djebeng meninggal dan dikuburkan. Perpindahan lokasi pemukiman kembali terjadi setelah lokasi pemukiman di Kayu Payung dirasakan terlalu jauh dari ibukota Distrik Tomohon dan juga jauh dari ruas jalan raya. Penduduk kampung jawa memindahkan negerinya pada tahun 1875 ke tempat sekarang yaitu di Sarongsong. Pendapat lain yang menyebabkan kepindahan mereka ialah perpindahan lokasi tempat mereka tinggal terserang sebuah wabah yaitu berjangkitnya penyakit waterpoken (cacar air atau dalam bahasa setempat disebut dengan luti) yang menelan banyak korban jiwa. Sehingga ketiga anak dari Tubagus Buang, yakni Tubagus Agus, Tubagus Baii dan Tubagus Abdullah beserta keluarganya meninggalkan tempat itu dan pergi ke Tanawangko (Tubagus Abdullah), Tumpaan di distrik Amurang (Tubagus Agus) dan Marisa (Tubagus Baii) di wilayah Gorontalo.

Sekitar tahun 1890 penduduk kembali berkumpul, dan mulai menghuni Kampung Jawa di lokasi sekarang. Dari keturunan Tubagus Buang, yang kembali dan membangun lagi Kampung Jawa Sarongsong adalah Tubagus Abdullah dari Tanawangko. Keturunan Tubagus Buang yang ada di Kampung Jawa berasal

darinya. Kampung Jawa Sarongsong kemudian memperoleh status negeri dan dipimpin seorang Hukum Tua (Kepala Desa) di tahun 1928.

Di pengasingan Minahasa, Tubagus Buang dengan pengikut-pengikutnya tidak diizinkan membawa istri dari Banten. Mereka kemudian menikah dengan perempuan dari Minahasa, terutama wanita-wanita dari Sarongsong, Sonder, Pineleng dan Tondano. Tubagus Buang menikahi wanita Minahasa bermarga (fam) Supit dari desa Lahendong. Dari pernikahan tersebut Tubagus Buang memperoleh hadiah perkawinan tanah garapan yang meliputi Kampung Jawa Sarongsong kini. Dari istrinya itu, Tubagus Buang memperoleh tiga orang anak lelaki, masing-masing: Tubagus Agus, Tubagus Bai'i dan Tubagus Abdullah.

Selain Tubagus Buang, para tokoh lain yang dibuang bersamanya dan bermukim di Kampung Jawa Tomohon adalah Penghulu Abusalam, Mas Djebeng, Mukali, Abdur Rasjid, Abdul Wahid, Abdul Haji, dan Abdur Rais. Dari antara interniran Banten yang mempunyai banyak keturunan hingga sekarang di Kampung Jawa, terutama adalah Tubagus Buang, Penghulu (Kadi) Abusalam dan Mas Djebeng. Sedangkan Abdul Wahid dan Abdur Rais tidak mempunyai keturunan di Kampung Jawa Sarongsong.

### **Tiga Tubagus dari Pemberontakan Haji Wakhia di Banten dan Lampung**

Selain Tubagus Buang dan pengikutnya yang diasingkan pada tahun 1839. Ada juga tiga orang buangan dari Banten lainnya yang diasingkan di tempat ini pada tahun 1850. Mereka bernama Raden Bagus (Tubagus) Jayakarta, Tubagus Suramarja dan Tubagus Mustafa. Menurut seorang tokoh yang tinggal di Kampung Jawa Tondano Abdul Razak Tumenggung, ada nama lain juga yang berada di Kampung Jawa Sarongsong yaitu Patih Tubagus Diningrat, Jaksa Tubagus Jayakarta, Demang Tubagus Suramarja. Keterangan ini diambil dari wawancara oleh Adrianus Kojongian. Dalam daftar nama staatgevangen en tahun 1852 di Karesidenan Manado juga memuat nama ketiga orang ini. Pengasingan ketiganya di Tomohon berawal dari peristiwa "Pemberontakan Wakhia" pada 1850.

Pemberontakan ini diawali oleh persekutuan ulama dan bangsawan yang tidak puas dan merasa tersingkir akibat keputusan pemerintah kolonial dalam penunjukkan Bupati baru. Sartono Kartodirjo merujuk bahwa persekutuan-persekutuan politik di Banten abad XIX adalah hubungan antara kaum elite agama dan kaum bangsawan Banten. Perkembangan percaturan politik di Banten dan konflik-konflik serta ketegangan-ketegangan yang ditimbulkannya tercermin dalam distribusi ikatan-ikatan persekutuan itu. Kaum bangsawan Banten terdiri dari beberapa sub-golongan dan cenderung untuk bertaut dengan satu golongan agama, oleh karena banyak dari anggota-anggotanya menjadi Kiai atau Haji. Dalam kenyataannya, kedua golongan itu mengejar tujuan yang sama mempertahankan sistem status tradisional. Seperti telah dikemukakan di atas, kedua golongan telah mengalami perubahan besar dan telah kehilangan bagian terbesar dari kekuasaan politik mereka; oleh karena itu mereka selalu ikut aktif dalam pergolakan-pergolakan politik. Selama abad XIX, kedua golongan merupakan unsur-unsur yang rusuh dan menyusahkan dalam arena politik di Banten.

Dalam kasus pemberontakan Wakhia ini kejadian bermula dengan meninggalnya bupati Serang R.A. Mandura Raja Jayanegara tahun 1849. Setelah kematiannya, baik anaknya Raden Bagus (Tubagus) Jayakarta (patih Serang)



maupun menantu-menantunya, Tubagus Suramarja (kliwon Serang), dan Mas Wiroleksono (demang Ciomas), tidak diangkat untuk menggantikannya. Oleh residen Banten mereka dianggap tidak akan mampu melakukan tugas bupati. Menurut residen, Raden Bagus Jayakarta adalah seorang yang tak berpengetahuan, tidak mengenal sopan santun, malas, tidak mempunyai rasa simpati terhadap rakyat, dan pematik; Tubagus Suramarja pernah dipecat dan diangkat kembali hanya untuk menghormati mertuanya; dan Mas Wiroleksono terlalu kecil prestisenya. Penggantinya ialah R. T. A. Tjondronegoro yang dahulunya adalah Bupati Pandeglang diangkat sebagai Bupati Serang yang baru. Posisi lama Tjondronegoro Bupati Pandeglang diberikan kepada Mas Ario Nitinegara yang dulunya adalah Patih Tjaringin.

Keputusan Residen untuk tidak mengangkat Tubagus Djayakarta sebagai pengganti Bupati menimbulkan kekecewaan yang besar kepadanya, sebab tak disangsikan lagi ia telah menaruh harapan yang besar karena pada waktu itu penggantian secara turun-temurun sudah merupakan satu pola umum di Jawa. Tidak hanya sekali dilangkahi posisinya tapi terjadi lagi untuk kedua kalinya. Ini bermula dengan pengangkatan R. T. A. Wiriadidjaja sebagai Patih Tjaringin (menggantikan posisi Mas Ario Nitinegara yang dipromosikan sebagai Bupati Pandeglang). Wiriadidjaja yang baru saja diangkat kemudian meninggal dunia dan posisi itu kemudian diberikan kepada anaknya R. T. Kusumanegara. Pengangkatan Kusumanegara menjadi Bupati yang baru menimbulkan reaksi yang tajam; dan dalam kenyataannya reaksi itu meningkat menjadi pemicu pemberontakan Wakhia. Di sini kita melihat satu kebijakan dalam soal pengangkatan kemudian menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang gawat. Sehingga dapat dimengerti jika Tubagus Djayakarta menghasut pemberontakan itu, karena sudah dua kali ia dilampaui.

Persekutuan kemudian dibuat antara Haji Wakhia dan Tubagus Djayakarta untuk mengadakan pemberontakan. Haji Wakhia adalah penduduk kampung Gudang Batu, orang kaya dan dianggap ulama besar. Haji Wakhia dengan dukungan penuh dari penduduk Gudang Batu, terus mengobarkan perjuangan menentang politik kolonial Belanda dan mengajak mengadakan "perang sabil"; dan persiapan-persiapan untuk itu dilakukan terus menerus di bawah pimpinan Penghulu Dempol. Beberapa tokoh lainnya yang terlibat dalam pemberontakan ini ialah Tubagus Iskak, Mas Derik, Mas Diad, Satus, Nasid, Asidin. Dalam bulan Januari sebenarnya telah tersiar desas-desus tentang adanya komplotan-komplotan dan pertemuan-pertemuan kaum perusuh, akan tetapi sebegitu jauh tidak diperoleh bukti-bukti yang membenarkannya.

Peristiwa pemberontakan diawali oleh pada tanggal 24 Februari 1850 ketika terjadi pembunuhan terhadap Demang Cilegon dan stafnya yang sedang mengadakan inspeksi di Rohjambu. Mereka sama sekali tidak mengetahui adanya kaum pemberontak yang sedang bergerak maju, dan karena tidak mendapat peringatan dari kepala desa bernama Nasid yang juga terlibat dalam rencana pemberontakan, mereka kemudian masuk perangkap dan semuanya dibunuh (Kartodirdjo, 1966, p. 124). Pemerintah Belanda kemudian merespon kejadian tersebut dengan mengirimkan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan ini. Satu persatu pemimpin pemberontakan kemudian tertangkap. Tubagus Djayakarta ditangkap bersama Tubagus Suramardja pada 15 April 1850

(Kartodirdjo, 1966, p. 126; Laporan Militer, 1851). Usaha menangkap pemimpin pemberontak lainnya dilakukan dalam beberapa kali penyerbuan. Pada pertempuran di Tegalpapak pada tanggal 3 Mei 1850, beberapa pemimpin dapat ditawan dan dibunuh. Namun Haji Wakhia dan Tubagus Ishak dapat meloloskan diri ke Lampung, kemudian ia bergabung dalam perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Singabranta dan Raden Intan. Di Lampung, Dalam satu pertempuran akhirnya Haji Wakhia dapat ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1856.

Setelah pemberontakan dapat dipadamkan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian membuang para pelaku pemberontakan. Melalui Besluit Gubernur Jendral tanggal 30 Oktober 1850 No. 2, Tubagus Djayakarta, Suramardja dan Tubagus Mustafa dibuang ke Manado. Lurah Nasid, Diad, Derik dan 8 orang lainnya ke Ternate, 12 orang dibuang ke Ambon dan 130 orang dibuang ke Banda. Di antara mereka diberikan hukuman untuk 10 tahun bagi 30 orang, 56 orang dibuang selama 8 tahun, 44 orang selama 5 tahun (Kartodirdjo, 1966, p. 127).

### **Eksil dari Peristiwa “Geger Cilegon” Tahun 1888**

Mengenai peristiwa pemberontakan Banten 1888 telah ditulis dengan sangat rinci oleh Sartono Kartodirdjo dalam desertasinya (Kartodirdjo, 1966). Pemberontakan Banten ini diawali oleh propaganda yang terjadi sejak dua dasawarsa sebelumnya. Di Banten sejak periode tahun 1870 terjadi kebangkitan gerakan keagamaan melalui Tarekat Qadiriyyah. Dengan kedatangan Haji Abdul Karim di Banten pada awal tahun 1870-an, tarekat Qadiriyyah memperoleh momentum. Di bawah pengaruh Haji Abdul Karim, tarekat itu semakin berakar di kalangan para kiai dan mempersatukan mereka. Pada waktu yang bersamaan, pengaruh para kiai atas pengikut-pengikut mereka bertambah secara luar biasa. Dengan memasuki tarekat Qadiriyyah, maka kesetiaan para santri kepada kiai dan persaudaraan di kalangan para santri menjadi lebih kokoh.

Gerakan tarekat yang diajarkan Haji Abdul Karim, terutama setelah ia kembali dari Mekkah ke desanya yaitu Lampuyang, tahun 1872 makin berkembang. Ia mendirikan pesantren dan dalam waktu yang relatif singkat mendapat banyak murid dan pengaruh. Pusat kegiatan Haji Abdul Karim di Tanara. Begitu pesatnya pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat dan pejabat pemerintah sehingga dikenal pula sebagai Kyai Agung bahkan dianggap sebagai Wali Allah.

Karena itu menimbulkan kekhawatiran pada pemerintah akan terjadi huru-hara, sehingga minta kepada Abdul Karim agar berangkat langsung menggunakan kapal ke Batavia. Berangkatlah ia tanggal 13 Februari 1876 ke Mekkah. Kepulangan ini beriringan dengan pengangkatannya sebagai pengganti Syekh Ketib Sambas, pemimpin tertinggi Tarekat Qadiriyyah di Mekkah (Kartodirdjo, 1960, pp. 56, 181). Setelah Haji Abdul Karim meninggalkan Banten, gerakan itu mulai berpaling dari kegiatan-kegiatan yang semata-mata diarahkan kepada kebangunan agama Islam, dan suatu semangat yang sangat anti-asing mulai merembesi praktek-praktek tarekat itu. Dan pada akhirnya haji-haji dan guru-guru tarekat yang berjiwa pemberontak menempatkan ajaran mistik sepenuhnya di bawah tujuan politik.

Pada tahun 1883 Kiai Haji Tubagus Ismail murid Kiai Abdul Karim pulang dari Mekkah. Sebagai keturunan Sultan Banten dia dianggap seorang calon “Wali Allah”. Dengan kehadirannya ini maka dorongan untuk mendirikan kembali kesultanan Banten pun muncul lagi. Pada tahun 1884 berlangsunglah perundingan pertama

yang membicarakan rencana kongkrit untuk mengadakan pemberontakan bersenjata. Perundingan itu terjadi di rumah Haji Wasid di bawah pimpinan Haji Tubagus Ismail (Kartodirdjo, 1960, p. 57). Setelah itu mulai hidup lagi gerakan-gerakan yang menuju kepematangan pemberontakan. Tubagus Ismail mempropagandakan gerakan untuk pemberontakan terhadap pemerintah kolonial yang dianggap kafir dengan jalan sabilillah. Gagasan untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap kolonial itu disambut baik oleh kiai-kiai lainnya di Banten.

Selain bangkitnya gerakan keagamaan di Banten, alasan lain yang kemudian berpengaruh terhadap terjadinya pemberontakan ialah adanya keterkaitan langsung antara meletusnya Krakatau dan terbentuknya Cilegon sebagai pusat pemerintahan lokal di Banten. Ketika terjadi tsunami, Anyer sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan kolonial setempat hancur total, sehingga pusat afdeling Anyer dipindahkan ke Cilegon.

Meletusnya Gunung Krakatau bila ditinjau dari korban manusia yang meninggal, di Banten lebih banyak menderita (21.565 jiwa) di bandingkan dengan Lampung (12466 jiwa), sebab pantai Banten lebih padat penduduknya. Anyer sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan kolonial setempat hancur total, sehingga pusat *Afdeeling* Anyer dipindahkan ke Cilegon (Alfian, et al., 1987, p. 222). Pindahan ini membuat orang Eropa kemudian tinggal di wilayah Cilegon. Tindakan ini bersamaan dengan propaganda kebencian terhadap barat yang sedang memuncak di kalangan penganut tarekat Qadiriyyah.

Pada malam tanggal 8 Juli 1888 menjelang pemberontakan diadakan suatu pesta besar sebagai kedok saja di rumah Haji Wakhia, mengadakan arak-arakan dan takbiran dengan menggunakan kain putih. Pesta malam diteruskan dengan arak-arakan yang diikuti oleh makin banyaknya orang dengan bersenjata golok dan tombak. Persiapan menuju realisasi pemberontak dipimpin K. H. Wasid dan Haji Tubagus Ismail bergerak dari Cibeber ke arah Saneja, yaitu tempat pemusatan untuk menunggu komando penyerangan. Pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888 pemberontakan dimulai di Cilegon untuk kemudian disusul serangan di Serang sasarannya ialah untuk menyerang para pejabat kolonial Belanda.

Pertama memasuki rumah Dumas, seorang juru tulis di Cilegon, tetapi ia dapat lolos, hanya istrinya luka-luka kena bacokan. Dumas melarikan diri ke rumah Jaksa. Sementara itu kaum pemberontak menuju rumah Patih. Tetapi ia sedang ke berada di Serang. Mereka kemudian membunuh Jaksa dan Ajun Kolektor. Tempat lainnya yang menjadi amukan pemberontak ialah rumah Asisten Resident. Pada peristiwa tersebut Henri Francois Dumas juru tulis Kantor Asisten residen, Raden Purwadiningrat, Johan Hendrik Hubert Gubbels, Mas Kramadireja dan Ulrich Bachet dibunuh pemberontak. Setelah berita mengejutkan tersebut diketahui Belanda, kemudian dikirim 40 orang serdadu yang dipimpin oleh Kapten Bartlemy. Terjadi pertempuran hebat antara para pejuang dengan serdadu Belanda. Setelah pemerintah mengirimkan pasukan-pasukan militernya dengan jumlah yang agak besar maka lambat laun dapat diatasi. Pengejaran para pemberontak Banten dilakukan maka akhirnya pada tanggal 30 Juli 1888 dari desa Sumur, jam 10 pagi, mereka terkepung dan beberapa kemudian terbunuh. Kemudian mereka melarikan diri ke desa Toyomerto dan terjadilah pertempuran antara rombongan haji Wasid dengan serdadu Belanda, di mana 9 pengikutnya tewas dan yang lainnya kemudian

ditangkap. Sekalipun hanya 8 orang Eropa dan 9 orang pribumi terbunuh, namun peristiwa ini sangat menghebohkan dunia kolonial Hindia Belanda, dan peristiwa ini diselidiki secara besar-besaran oleh pihak Belanda (Steenbrink, p. 52).

Meskipun gerakan tersebut dikategorikan "pemberontakan petani" pelaku tidak sebatas hanya petani saja. Mereka justru adalah kelompok elit desa yang relatif lebih maju dan tinggi dalam status sosial ekonomi. Dan sering pula mereka adalah pemimpin agama (Lapian, 1992, p. 223). Akibat dari pemberontakan petani Banten ini Pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus meninjau kembali kebijaksanaan politik kolonialnya, baik dalam hal birokrasi dan perpajakan maupun dalam bidang keagamaan. Sartono menyimpulkan bahwa motivasi pemberontakan ini adalah campuran antara motif ekonomi (keja paksa, pajak), politik, sosial (tingkah laku pegawai Belanda yang kasar dan tidak menghormati sikap bebas orang Banten) dan Agama terutama gagasan perang sabil.

Haji Wasid dan beberapa pemimpin pemberontakan kemudian dihukum gantung. Sedangkan yang lainnya menerima hukuman dibuang berjumlah 94 orang (Kartodirdjo 1966; Jongmans, 1921, p. 204; Kolonial Verslag, 1889, pp. 3, 4, 74). Dari jumlah tersebut ada 17 orang yang dibuang di beberapa tempat di Karesidenan Manado, termasuk di antaranya 5 orang yang dibuang ke kampung Jawa Tondano.



Gambar. 2 Para pelaku pemberontakan 1888 di foto di depan penjara Cilegon (KITLV Leiden University Collection)

Ada enambelas dari mereka diasingkan di Minahasa pada tahun 1889 dan menjalani beberapa tahun kerja paksa dan di penjara di Manado. Pada tahun 1903 van Kol, ketika berkunjung ke Manado, menulis pertemuannya dengan beberapa narapidana dari Banten di Penjara Manado. Val Kol menuliskan dalam laporannya "Orang-Orang Banten ini telah terlibat dalam pembunuhan mengerikan di Tjilegon, yang lebih disebabkan oleh salah urus Belanda daripada oleh fanatisme Islam. dalam Surat dakwaan mereka berbunyi: "Upaya dengan tujuan menggulingkan Pemerintah, disertai dengan penghancuran, pembunuhan, penjarahan yang dilakukan" dan hukumannya adalah 15 tahun kerja paksa. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tampak bagi saya bahwa para narapidana ini sepenuhnya pantas menerima hukuman mereka. (van Kol, 1903, p. 301). Dalam bagian akhir val Kol menuliskan "mereka telah menjadi kaki tangan dalam "pembunuhan mengerikan" di Cilegon, dan menjalani hukuman lima belas tahun kerja paksa".

Tabel 4. Daftar Nama Eksil Geger Cilegon yang diasingkan di Minahasa tahun 1889

No	Nama	Asal	Umur	Pekerjaan	Lokasi Pengasingan
1	Haji Abdul Karim	Beji	30	Petani	Tondano
2	Haji Abubakar	Tjikandi	44	Guru Agama	Kema
3	Haji Burak	Gulasir	30	Petani	Manado
4	Haji Daud	Balagendung	40	Petani	Tondano
5	Haji Djafar	Nyamuk	25	-	Manado
6	Haji Djamar	Bayur	40	Petani	Kema
7	Haji Durajak	Tanara	35	Guru Agama	Tondano
8	Haji Halari	Tjibeber	50	Petani	Kema
9	Kamim	Kepudjenok	45	Petani	Manado
10	Haji Kasan	Wanasaba	35	Petani	Manado
11	Kasim	Tjekok	32	Nelayan	Manado
12	Haji Kidin	Tjilentrang	30	Petani	Manado
13	Haji Marjaya	Pasirgadung	25	Petani	Manado
14	Haji Moh Arsad Tawil	Tanara	34	Guru Agama	Kema
15	Haji Moh Asnawi	Tjibeber	27	Pedagang	Manado
16	Haji Ramidien	Tjigeunah	30	Petani	Tondano

Sumber: Kartodirjo, 1966

Lima belas tahun kemudian yaitu pada tahun 1903 masa tahanan mereka telah selesai (*dwangarbeid*). Setelah mereka menyelesaikan hukuman di penjara Manado, mereka kemudian dibebaskan. Namun belum diizinkan pulang ke Banten. Dan pada tahun 1918 mereka diberikan pengampunan untuk kembali ke Banten (Bataviaasch nieuwsblad, 1918; De Sumatra Post, 1918). Beberapa dari mereka pulang ke Banten, Namun ada beberapa dari mereka yang memilih untuk menetap di Minahasa. Termasuk ada lima orang yang menetap di Kampung Jawa Tondano setelah masa tahanan mereka berakhir. Koran Batavia Nieuwsblad 1 Maret 1918 menyebutkan bahwa orang buangan dari Banten seiring dengan langkah pencabutan keputusan politik terhadap mereka antara lain: Balki Hadji, Hadji Moebamad Kanapiae, Mas Mohamad Hadji Arsad, Haji Mohamad Arsad Tawil dan Hadji Boerak diizinkan kembali ke daerah asalnya (kediaman mereka di Banten). Sekalipun sudah mendapatkan pengampunan, namun beberapa di antara mereka memilih untuk tetap tinggal di Minahasa.

Mereka kemudian menikah di tempat bermukim masing - masing diantaranya Hi. Djafar bin Kyai Mas Hositym kawin dengan Embu Maspekeh, Hi. M. Asnawi dua kali menikah, isteri pertama di Manado Sri Haji Ali dan isteri ke dua di Manado Khatma Haji Djafar, Asnawi Sutu menikah dengan Rubinga Haji Ali, Haji. Abdul Karim menikahi Otik Hi. Ali beranak, Haji Ramidin menikah dengan wanita kampung jawa bermarga Baderan, Haji Marjaya kawin dengan cucu dari Maspekeh

dan Hi. M. Arysad Tawil menikah di Kema Tonsea tidak memiliki anak, tapi kemudian salah satu anaknya dari pernikahan dengan istri yang berada di Banten datang ke Manado. Dari anak inilah marga keluarga Thawil di Manado berasal.

Di antara para eksil yang memilih untuk tetap tinggal di Minahasa setelah hukuman pengasingan berakhir, ada dua nama yang patut dikemukakan yaitu Haji Mardjaya dan Haji Muhammad Arsyad Thawil. Sebagai eks orang buangan mereka kemudian diangkat sebagai pejabat urusan islam di dua distrik yang ada penduduk yang beragama Islam (Adatrechtbundel, 1911, pp. 312-313). Haji Mardjaya yang dikatakan menikah di kampung Jawa Tondano dan kemudian pindah ke distrik Tumpaan (Sonder) karena diangkat sebagai deputi urusan islam di distrik tersebut. Sedangkan orang lainnya yaitu Haji Muhammad Arysad Tawil diangkat sebagai penghulu di wilayah Manado (Adatrechtbundel, 1911, p. 312).



Gambar 3. Potret K. H. Muhammad Arsyad Thawil  
Sumber: Arsip Keluarga Arsyad Thawil di Manado

Eksil lainnya di Kampung Jawa Sarongsong (dari Padang dan dua Pedagang Bugis). Pada sekitar tahun 1880-an di kampung Jawa Sarongsong datang beberapa orang dari kampung Jawa Tondano yaitu Malim Muda (atau Perambahan) dan beberapa pemuda dari kampung Jawa Tondano yang bermarga Mertosono, Kiai Demak dan Rifa'i yang kemudian menetap di sini. Berikutnya, datang pula Kasim Maskun pada sekitar tahun 1890. Maskun semula adalah Lurah di Cilegon Banten. Ia terlibat dalam pemberontakan yang dikenal dengan nama Geger Cilegon pada Juli 1888. Selain para tahanan Negara yang diasingkan Belanda, ada dua pendatang dari Bugis dari Sulawesi Selatan bernama Lasambang dan Lakoro yang singgah ke Tomohon karena berdagang. Mereka kemudian menikah dengan wanita dari Tomohon dan kemudian memilih menetap di kampung Jawa Tomohon. Di Kampung Jawa Sarongsong terdapat juga marga Lihawa, Hadju, Monoarfa dan

Wartabone. Mereka anak para bangsawan dari Gorontalo yang kemudian bersekolah di Tondano & Tomohon namun menikahi wanita setempat dan memutuskan untuk tidak kembali.

Carpentier Alting yang mengunjungi Kampung Jawa Sarongsong pada 1902 menyebutkan bahwa ada 161 jiwa penduduk islam yang mendiami sebuah “koloni kecil” kampung Jawa Sarongsong. Dalam aspek administratif kampung Jawa Sarongsong pada awalnya masih menjadi bagian dari dua desa yaitu Tumatangtang dan Lansot Sarongsong yang dibagi atas dua jaga. Kemudian pada tahun 1928 dengan persetujuan Kepala Onderdistrik Tomohon dan Kepala Distrik Manado yang membawahnya, Kampung Jawa Sarongsong diresmikan menjadi sebuah desa yang berdiri sendiri. Seorang keturunan eksil bernama Djasmani Tabiman (marga aslinya Rifa’i) keturunan dari Mas Rifa’i seorang pengikut Kiai Modjo diangkat menjadi Hukum Tua Kampung Jawa Sarongsong. Pada masa pemerintahan Tabiman yaitu pada tahun 1921 tokoh Serikat Islam (SI), Haji Omar Said Tjokroaminoto mengunjungi Kampung Jawa Sarongsong.

Selain itu juga ada seorang tokoh yang kemudian diasingkan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Banjer di Kota Manado pada abad ke XIX. Tokoh tersebut bernama Abdul Wahid Zaelani yang juga menurunkan marga Tubagus yang keturunannya banyak tinggal di wilayah tersebut dan membentuk komunitas islam di kampung Banjer di Manado. Keturunan dari Wahid Zaelani ini kemudian menggunakan faam Kader. Di kampung Banjer di Kota Manado terdapat pemakaman keluarga Wahid Zaelani dan keturunannya.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan terungkap beberapa hal yang menjadi faktor-faktor mengapa Belanda mengasingkan para eksil Banten ke Manado. Yang pertama ialah lokasi ini pada Abad ke XIX adalah lokasi yang sangat terisolir sehingga oleh Gubernur Jendral dan Dewan Hindia kemudian memilih Manado dan pedalaman Minahasa yaitu Tondano dan Tomohon menjadi lokasi pengasingan. Para Eksil dari Banten tersebut ditempatkan di beberapa lokasi yang berbeda yaitu Manado, Tondano dan Tomohon. Para eksil Banten ini berlatar belakang Ulama, sehingga kemudian mereka di pengasingan tetap mejadi memeluk Islam dan bahkan kemudian melakukan syiar Islam dipedalaman Minahasa seiring dengan perkembangan Kampung Jawa Tomohon. Haji Muhammad Arsyad Thawil dan Haji Marjaya bahkan setelah menyelesaikan waktu hukuman pengasingan, setelah diampuni pemerintah kolonial Belanda, kemudian menjadi guru agama di Manado dan Tumpaan (wilayah Minahasa bagian selatan), Pengasingan para Eksil dari Banten di Minahasa memiliki dampak yang sangat signifikan pada perkembangan Islam di beberapa wilayah di Manado dan Minahasa (terutama kota Tomohon) dengan terbentuknya perkampungan Islam yang pertama di Tomohon, Adaptasi sosial budaya dilakukan Para eksil tersebut di Minahasa, pada bagian akhir perlu ditambahkan yaitu para eksil ini yang semuanya adalah pria, mereka kemudian menikahi para perempuan Minahasa yang kemudian terkonversi menjadi Muslim. Perkawinan ini membentuk komunitas campuran Banten dan Minahasa yang menjadi cikal bakal dari sebagian komunitas Islam kecil yang ada di pedalaman Minahasa.

## Referensi

- Adatrechtbundel XII, 1911.
- Alfian, T., I. et al. (1987). *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- ANRI, (18300. Ministerie van Kolonien 2538, Besluit van den Gouverneur-Generaal buiten rade, 30 April 1830 No. 1 mukadimah dan perintah No. 1 kepada Residen Menado.
- ANRI. (1973). *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. Jakarta: ANRI.
- ANRI. (1973). *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. Jakarta: ANRI.
- Babcock, T. G. (1981). *Muslim Minahasans with Roots in Java: The People of Kampung Jawa Tondano, Indonesia*. No. 32 1981a.
- Bataviaasch nieuwsblad, edisi 01 Maret 1918.
- Besluit 14 April 1840 No. 5 berisi keputusan pembuangan mereka ke Manado dan Banyuwangi oleh Gubernur Jendral.
- Carey P. B. R. (2012). *Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855*. Jakarta: Gramedia & KITLV.
- De Sumatra Post, 20 Maret 1918.
- Dumont d'Urville, J. S. C. *Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécutée par order du roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville*. Paris, 1830-1834.
- Gebroeders van Cleef, (1828). *Staats Almanak voor den Jare 1827*. Gravenhage, Amsterdam.
- Johannes Olivier, (1937). *Reizen in den Molukschen Archipel naar Makassar, enz. in het gevolg van den Gouverneur-Generaal van Nederland's Indie in 1824 gedaan*. Beiserinck.
- Jongmans, P. H. C., (1921). *De exorbitante rechten van den gouverneur-generaal in de praktijk*. Amsterdam: J. H. De Bussy.
- Kartodirdjo, S. (1966). *Peasant Revolt of Banten 1888*.
- Kartodirdjo, S. (1966). *The Peasant's Revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel*. Martinus Nijhoff, The Hague.
- Kembuan, R. (2016). *Bahagia di Pengasingan: adaptasi Orang-Orang Buangan Muslim di Kampung Jawa Tondano Abad XIX*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kojongian, A. (2011). *Tomohon Kotaku: Tomohon Dulu dan Kini*. CV Agape.
- Kolonial Verslag, 1889.



- Kuntowijoyo, (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Lapian, A. B. (1992). *Dari Babad dan Hikayat sampai sejarah Kritis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Laporan Militer, (1851). in Vb. Jan. 15, 1851, La C, No. 23.
- Palar H. B. (2009). *Wajah Baru Minahasa*. Jakarta: Grafika Putra.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of modern Indonesia since 1200*. Third Edition. Wales: Palgrave.
- Schrikker, A. (2007). *Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka 1780-1815 expansion and reform*. Leiden: TANAP Monograph, Blill.
- Staatsblad van Nederlandsch Indië.
- van der Aa, A. J. (1869). *Biographisch Woordenboek dee Nederlanden*, Twaalfde deel, Haarlem, Van Brederode.
- van Kol., H. (1903). *Uit onze Kolonien*. Leiden: Sijthoff.